

**KONFLIK TAPAL BATAS ANTARA KOMUNITAS  
SUMPUR DENGAN KOMUNITAS BUNGO TANJUNG  
KABUPATEN TANAH DATAR**

**SKRIPSI**

**Tugas Untuk Mencapai Gelar Sarjana Ilmu Sosial  
Pada Fakultas Ilmu Sosial Dan Ilmu Politik  
Universitas Andalas**

**Oleh**

**MORA DINGIN  
BP. 05191022**



**JURUSAN SOSIOLOGI  
FAKULTAS ILMU SOSIAL DAN ILMU POLITIK  
UNIVERSITAS ANDALAS  
PADANG 2010**

## ABSTRAK

MORA DINGIN, 05 191 022. Fakultas Ilmu Sosial Dan Ilmu Politik Jurusan Sosiologi Universitas Andalas Padang. Judul Skripsi: Konflik Tapal Batas Antara Komunitas Sumpur dengan Komunitas Bungo Tanjung Di Kabupaten Tanah Datar. Jumlah halaman 89 Lembar. Pembimbing I Dr. Asmawi, MS, Pembimbing II Prof. Dr. Afrizal, MA.

Munculnya otonomi daerah yang dilandasi oleh UU No. 22 tahun 1999 yang kemudian direvisi dengan UU No. 32 tahun 2004 memberikan peluang bagi daerah untuk mengatur daerahnya masing-masing. Di Sumatera Barat implementasi dari kebijakan otonomi daerah adalah kembalinya kepada pemerintahan nagari. Kembali kenagari telah menyisakan berbagai macam permasalahan yaitu banyaknya muncul konflik tapal batas antara nagari. Salah satunya adalah konflik tapal batas antara komunitas Sumpur dengan komunitas Bungo Tanjung, Kabupaten Tanah Datar. Tujuan umum dari penelitian ini adalah untuk mendeskripsikan terjadinya konflik tapal batas antara komunitas Sumpur dengan Komunitas Bungo Tanjung. Sedangkan tujuan khususnya untuk mengkaji penyebab terjadinya konflik. Manfaat penelitian adalah sebagai tambahan bacaan dan rujukan bagi peneliti berikutnya, serta masukan bagi masyarakat dan institusi-institusi Pemerintahan Kabupaten Tanah Datar dalam menyelesaikan konflik antara komunitas Sumpur dengan komunitas Bungo Tanjung.

Untuk melihat masalah ini peneliti menggunakan teori Randal Collin. Konflik merupakan sesuatu hal yang sentral dalam kehidupan bermasyarakat. Setiap orang mempunyai sifat sosial tapi juga mudah berkonflik dalam hubungan mereka. Metode yang digunakan adalah metode kualitatif dengan tipe pendekatan deskriptif yang bertujuan untuk memberikan gambaran yang terperinci dari suatu masalah sosial yang terjadi. Pengumpulan data yang dilakukan adalah observasi dan wawancara mendalam. Pemilihan informan dalam penelitian ini dengan cara *Snowballing* (Bola Salju). Penentuan jumlah informan ditentukan dalam prinsip kejenuhan data.

Dari hasil penelitian yang dilakukan diperoleh kesimpulan bahwa konflik tapal batas yang terjadi antara kedua komunitas ini disebabkan oleh perebutan lahan yang ada di daerah perbatasan karena tanah dianggap bernilai ekonomi. Sedangkan usaha untuk menyelesaikan masalah ini, pernah dilakukan oleh kedua komunitas, mulai dari tingkat Kecamatan hingga tingkat Kabupaten dengan pembentukan tim sembilan, tetapi belum menghasilkan suatu penyelesaian. Sekarang masalah tersebut didampingi oleh sebuah lembaga sosial (Perkumpulan Qbar). Untuk mencapai suatu kesepakatan damai kedua komunitas mempunyai kendala-kendala baik faktor internal maupun eksternal. Faktor internal adalah ketidaksolitan atau masyarakat mempunyai pendapat yang berbeda dalam menyelesaikan masalah mereka sedangkan faktor eksternal karena kejenuhan atau ketidakmampuan pemerintah dalam mencari jalan penyelesaian.



## **BAB I**

### **PENDAHULUAN**

#### **1.1.Latar Belakang**

Kebijakan otonomi daerah (Otonomi Daerah) di Indonesia muncul setelah krisis nasional melanda yang diikuti oleh gelombang reformasi besar-besaran. Pada saat itu terjadi gelombang tuntutan ketidakpuasan berbagai elemen masyarakat sipil di berbagai daerah mengenai pola hubungan antara pusat dan daerah yang dirasakan tidak adil. Tidak ada jalan lain bagi pemerintah pusat kecuali mempercepat pelaksanaan kebijakan otonomi daerah itu<sup>1</sup>.

Kebijakan nasional mengenai otonomi daerah dan pemerintahan daerah telah dituangkan dalam UU Nomor 22 Tahun 1999 tentang Pemerintahan Daerah yang kemudian direvisi dengan UU Nomor 32 Tahun 2004. Undang-undang tersebut menyatakan bahwa daerah diberikan wewenang yang seluas-luasnya untuk mengurus daerahnya sendiri menurut asal usul daerah masing-masing. Hal ini dilakukan sebagai solusi untuk menyelesaikan persoalan pemerintahan sentralistik yang membatasi daerah untuk dapat mengurus dan mengembangkan daerahnya sendiri menjadi desentralistik dengan cara memberikan wewenang yang luas kepada daerah ( Leti sundawati dan Soni Trison, 2006 : 5 )

Tujuan pokok otonomi daerah adalah untuk meningkatkan kesejahteraan masyarakat, pengembangan kehidupan demokrasi, keadilan, pemerataan dan

---

<sup>1</sup> Prof. Dr. Jimly Asshiddiqie,SH, lihat [http://www.legalitas.org/incl\\_php/buka.php=art+4&f=otonomi daerah\\_jimly.htm](http://www.legalitas.org/incl_php/buka.php=art+4&f=otonomi+daerah_jimly.htm) diakses tanggal 20 April 2009

terpeliharanya hubungan yang kondusif antara pusat dan daerah, serta menjaga tetap tegaknya keutuhan Negara Kesatuan Republik Indonesia (NKRI). Sedangkan tujuan lainnya adalah untuk mempercepat pertumbuhan pembangunan, dan meningkatkan kesejahteraan masyarakat<sup>2</sup>.

Di Sumatera Barat pemerintah merealisasikan sistem pemerintahan nagari, sebagai implementasi dari undang-undang otonomi daerah dengan mengeluarkan Perda Nomor 9 tahun 2000 tentang Pokok-Pokok Pemerintahan Nagari yang direvisi dengan Perda Nomor 2 Tahun 2007. Nagari dijadikan unit administratif terendah di kabupaten menggantikan desa. Menurut Kurnia Warman dan Rahmadi ( 2005: 4 ) ada dua alasan kenapa perda tersebut lahir ditingkat provinsi yaitu :

1. Bentuk pemerintahan terendah yang terdapat di seluruh daerah Sumatera Barat, kecuali Mentawai, adalah homogen dengan sebutan nagari.
2. Adanya aspek historis, dimana tahun 1979 di bawah rezim yang sentralistik menetapkan UU No.5 tahun 1979 tentang pemerintahan desa, dan pemerintahan provinsi Sumatera Barat harus tunduk dan menggantikan sistem pemerintahan nagari dengan sistem pemerintahan desa. Untuk mempertahankan adat, maka Pemda provinsi Sumatera Barat mengeluarkan perda no. 13 tahun 1983 tentang nagari sebagai kesatuan masyarakat hukum adat di wilayah Sumatera Barat, sehingga pada waktu itu nagari di ibaratkan sebagai simbol, dan nagari hanya sebatas sebagai kesatuan masyarakat hukum adat.

---

<sup>2</sup> Oleh Benyus Damanik Lihat [http://www.group.yahoo.com/latak\\_message/Tentang Otonomi Daerah](http://www.group.yahoo.com/latak_message/Tentang_Otonomi_Daerah) diakses 20 april 2009

## BAB IV

### PENUTUP

#### 4.1. Kesimpulan

Berdasarkan temuan data di lapangan dapat disimpulkan bahwa konflik perbatasan antara komunitas Sumpur dengan komunitas Bungo Tanjung sudah berlangsung sejak lama dengan eskalasi konflik terus meningkat hingga paska otonomi daerah (kembali kepada Pemerintahan Nagari). Konflik perbatasan ini merupakan konflik antara dua komunitas yaitu komunitas Sumpur dengan komunitas Bungo Tanjung. Konflik ini melibatkan elit Pemerintahan Nagari khususnya pihak komunitas Sumpur karena konflik ini tidak bisa dilepaskan dari kepentingan Pemerintah Nagari yaitu bagaimana untuk meningkatkan Pendapatan Asli Nagari melalui uang sewa yang dibayarkan oleh komunitas Bungo Tanjung.

Hasil penelitian menyatakan bahwa konflik antara komunitas Sumpur dengan komunitas Bungo Tanjung bermula atas perebutan atas pengelolaan dan penguasaan lahan yang ada di daerah perbatasan. Perebutan lahan didasari atas kepentingan ekonomi kedua komunitas. Adanya perebutan lahan menyebabkan terjadinya pengelolaan dan penguasaan yang timpang dimana secara *defacto* lahan tersebut di kuasai oleh komunitas Bungo Tanjung, namun secara *dejure* oleh komunitas Sumpur lebih mempunyai bukti-bukti yaitu berupa keputusan Bupati tahun 1955 serta surat perjanjian penyewaan lahan oleh komunitas Bungo Tanjung yang ada diperbatasan ke dua nagari.



## DAFTAR PUSTAKA

### Buku :

- Afrizal.2005. *Pengantar Metode Penelitian Kualitatif : Dari Pengertian Sampai Penulisan Laporan*. Laboratorium Sosiologi FISIP UNAND
- Chadwick, Bruce A (et.al).1991. *Metode Penelitian Ilmu Pengetahuan Sosial*. Semarang: IKIP.
- Coser,Lewis. 1967. *Countinuities In The Study Of Social Conflict*. New York: The Free Press
- Collin, Randall. 1975. *Conflic Sosiologi: Toward an Explanatory Science*. New York : Academic Press
- Faisal, Sanapiah. 2003. "*Format-Format Penelitian Sosial*". Jakarta: PT.Raja Grafindo Persada.
- Fisher,Simon etc.2000.*Mengelola Konflik: Keterampilan Dan Strategi Untuk Bertindak*. Jakarta: The British Council, Indonesia
- Haris, Samsuddin, dkk. 2004. *Desentralisasi dan otonomi Daerah : Naskah Akademik Dan RUU usulan LIPI*. Jakarta: LIPI Press
- Johnson.P.Doyle,1986. *Teori Sosiologi: Klasik dan Modern 1*. Terj. Robert M.Z. Jakarta: PT. Gramedia Pustaka Utama
- Johnson.P.Doyle,1986. *Teori Sosiologi: Klasik dan Modern 2*. Terj. Robert M.Z. Jakarta: PT. Gramedia Pustaka Utama
- M.A.Veger. K.J. 1993. *Realitas Sosial ( Refleksi Filsafat Sosial Atas Hubungan Individu-masyarakat dalam cakrawala sejarah sosiologi)*. Jakarta : PT Gramedia Pustaka Utama.
- Miall,H.Ramsbotham,O.Woodhouse, T.2002.*Resolusi Damai Konflik Kontemporer*. Jakarta: PT.Raja Grafindo Persada
- Moleong, Lexy. 2005. *Metode Penelitian Kualitatif*. Bandung: Remaja Rasda Karya.
- Poloma.M.margaret. 2007. *Sosiologi Kontemporer*. Jakarta: Raja Grafindo Persada
- Pruitt G Dean, Rubin Z Jeffrey, 2004, *Teori Konflik Sosial*, Yogyakarta: Pustaka Pelajar
- Rizer, George. 1992. *Sosiologi Ilmu Pengetahuan Berparadigma Ganda*. Jakarta: Rajawali Pers.
- Ritzer, George dan Douglas J Doodman. 2007. *Teori Sosiologi Modern*. Jakarta: Kencana